

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Bawono, Ick Rangga dan Mochamad Novelsyah, *Perpajakan Untuk Bendaharawan* (Yogyakarta :UPP STIM YPKN, 2012).
- BPK: *Kepatuhan Pajak Lembaga Kementerian dan Pemda Masih Rendah*, <http://nasional.kontan.co.id/news/bpk-kepatuhan-pajak-lembaga-kementerian-dan-pemda-masih-rendah>, diakses 3 September 2015.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- Diana, Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT Refika Adimata, 2013).
- Gwartney, James D. dan Robert A Lawson, *The Impact Of Tax Policy On Economic Growth, Income Distribution, and Allocation of Taxes* (Inggris: Cambridge Univ Press, 2006).
- Gunadi, *Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, Nomor 5, Februari 2005 hal 4-9.
- , *Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 Nomor 5, 2006.
- Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas* (Simposium Nasional Akuntansi XV, 2012).
- Harahap, Abdul Asri, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Integrita Dinamika Press, 2004).
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2004).
- Ilyas , Wirawan B. dan Rudi Suhartono, *Perpajakan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Ismon Zakya HS1, Andreas dan Poppy Nurmayanti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. (Universitas Riau: 2014).

Kahono, Sulud, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang)*, Masters Thesis, Program Pascasarjana (Universitas Diponegoro: 2003)

KPP Cirebon Sosialisasi Pajak ke 125 Bendahara : <http://www.radarcirebon.com/kpp-cirebon-sosialisasi-pajak-ke-125-bendahara.html>, diakses 3 September 2015.

Krause, K, *Tax Complexity: Problem or Opportunity?* Public Finance Review 28 (5), 395-414, 2000.

Marcus Taufan Sofyan, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*, Skripsi Sarjana (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara: 2005).

Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi* (Yogjakarta: Andi, 2011).

Muliari, Ni Ketut dan Outu Ery Setiawan, *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur* (Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 2009)

Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rosda, 2010).

Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Nurmantu, Syafri, *Kepatuhan Perpajakan*, (Online), tersedia: <http://www.google.com>, diakses 18 Agustus 2015.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.

_____, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

_____, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

_____, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah*.

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

_____, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang /Jasa Pemerintah.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/ PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/ PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/ PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas PPh yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/ PMK.011/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN.

_____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor :542/PMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

_____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor :542/PMK.04/2000 j.o KMK No.235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Penentuan Wajib Pajak Patuh yang diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

_____, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak* (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2011).

_____, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak-pajak Negara* (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2011).

_____, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, *Bendahara Mahir Pajak, Edisi Revisi* (Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2013).

Rajif, Muhammad, Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UKM di Cirebon. E-Journal Universitas Gunadarma, 2012.

Ratmono, Dwi dan Faisal, *Model Kepatuhan Pajak Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak* (Simposium Nasional Akuntansi XVII, 2014).

Resmi, Siti, *Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Santoso, Wahyu, *Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Keuangan Publik, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2008, Hal 85 – 137.

- Setyorini, Musadieq dan Dewantara, *Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi)*, *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (jab)*|Vol. 5 no. 1, diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2015).
- Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sumaryo, Memahami Mekanisme Saling Uji Bagi Pejabat Perbendaharaan Dalam Tugasnya: [http://www.bppk.kementerian keuangan.go.id/ publikasi/artikel/147-artikel-anggota](http://www.bppk.kementerian_keuangan.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggota), diakses 28 Desember 2015.
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri sipil untuk mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Surjoputro, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: 2009).
- Syani, Adi Putra “Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Pada Aspek Perpajakan (Studi Kasus di UIN Jakarta)” tesis, tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).
- Tegaskan Peran Strategis Bendahara, Ditjen Pajak Gelar Workshop, <http://jaringnews.com/ekonomi/umum/34302/tegaskan-peran-strategis-bendahara-ditjen-pajak-gelar-workshop>, diakses 3 September 2015.
- Trivedi, V. U., M. M. Shehata, and B. E.Lynn. *Impact of Personal and Situational Factors on Tax Compliance: An Experimental Analysis*. *Journal of Business Ethics*, Oktober 2003.
- Tryana, Tiraada, *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan”* *Jurnal EMBA* Vol.1 No. 3, diterbitkan (Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013).
- Utami, Andi dan Ayu Noorida Soerno, *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak*

Pratama Serang, diterbitkan (Serang : Simposium Nasional akuntansi XV, 2012).

Waluyo, *Perpajakan di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

527.624 WP Bendahara Negara Akan Diregistrasi Ulang,
<http://finansial.bisnis.com/read/20140325/10/213758/527.624-wp-Bendahara-negara-kan-diregistrasi-ulang->, diakses 3 sept 2015.

